

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | News Title : Bappebti Pastikan Tahun Ini RI Bakal Punya Bursa Kripto | |
| | Media Name : kompas.com | Journalist : Elsa Catriana |
| | Publish Date : 23 January 2023 | Tonality : Positive |
| | News Page : 1 | News Value : 3,000,000 |
| | Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti) | Ads Value : 1,000,000 |
| | Section/Rubrication : Money | Topic : Bursa Aset Kripto |

Bappebti Pastikan Tahun Ini RI Bakal Punya Bursa Kripto

Kompas.com - 23/01/2023, 17:00 WIB



Ilustrasi investasi aset kripto. (Dok. Shutterstock/Mega Bintang)

Penulis: **Elsa Catriana** | Editor: **Aprilia Ika**

JAKARTA, KOMPAS.com – Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Didid Noordiatmoko menjelaskan, Bappebti siap menghadirkan bursa aset kripto pada tahun 2023 ini.

Didid mengatakan, komitmen tersebut sesuai mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Sesuai arahan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, agar Bappebti segera membuat kelengkapan ekosistem perdagangan fisik aset kripto di Indonesia. Dengan kata lain, kami siap menghadirkan **bursa kripto** pada tahun 2023 ini," ujarnya dalam siaran resminya, Senin (23/1/2023).

CPO diperdagangkan di Bursa Berjangka 2023

Didid melanjutkan, Bappebti diminta untuk dapat menetapkan komoditas yang dapat dijadikan referensi harga di bursa berjangka, khususnya crude palm oil (CPO).

Ditargetkan Juni 2023, CPO akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, baik untuk perdagangan domestik maupun ekspor.

Selain itu, menurut Didid, Bappebti akan terlibat secara aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait PPSK. Sebab, perlu ditetapkan batasan kewenangan Bappebti dan OJK, serta definisi yang jelas mengenai komoditas dan derivatif dalam industri perdaganganberjangka komoditi.

Sistem Resi Gudang (SRG)

Didid mengatakan, Bappebti akan mengencarkan sosialisasi dan meningkatkan pemanfaatan sistem resi gudang (SRG).

Bappebti juga akan memperbaiki tata kelola dan transformasi Bappebti sehubungan dengan terbitnya UU PPSK untuk meningkatkan kinerja Bappebti.

Selain itu, untuk mewujudkan visi dan misi organisasi seperti penyusunan mitigasi risiko, peningkatan integritas, dan efektifitas pengawasan.

Tingkatkan sinergi 2023

Bappebti juga akan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terkait penindakan pelaku usaha ilegal melalui pemberdayaan Penyidik PNS (PPNS) di pusat dan daerah.

"Pada kesempatan ini, kami mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi agar pelaksanaan program kerja 2023 dapat dilakukan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Kita harus meningkatkan kolaborasi di lingkungan Bappebti, memperkuat penyediaan data dan informasi, serta memperbanyak literasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media sosial maupun media massa," jelas Didid.